



PERAN HUMAS DISKOMINFO DALAM PENGELOLAAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH

**Resyiana Saffira Rustandi¹, Laila
Fitria Rahma², Nazalla Vidya
Marlayza³, Intan Amelia⁴, Zikra
Mifta hul Jannah⁵, Dwi
Sulistiani⁶, Ali Alamsyah
Kusumadinata⁷**

¹⁻⁷) Sains Komunikasi, Universitas
Djuanda

Article history

Received : Oktober 2025

Revised : Nopember 2025

Accepted : Nopember 2025

*Corresponding author

Resyiana Saffira Rustandi

Email : resyianasr@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran Humas Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor dalam mengelola informasi publik. Sebagai bagian dari pemerintah, Humas memiliki tugas penting sebagai penghubung antara pemerintah dengan masyarakat, agar informasi yang disampaikan dapat akurat, transparan, dan dapat dipercaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data melalui observasi langsung selama kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dan wawancara dengan staf Humas Diskominfo, dengan cara menganalisa data, serta menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat peran tersebut telah diterapkan dengan baik oleh Humas Diskominfo. Dalam peran sebagai penasihat ahli, Humas memberikan saran strategis dalam penyusunan pesan kebijakan publik. Dalam peran sebagai fasilitator komunikasi, Humas mengelola media sosial dan website resmi sebagai alat utama untuk berinteraksi dengan masyarakat. Dalam peran sebagai fasilitator pemecahan masalah, Humas aktif menjawab isu hoaks, seperti dalam kampanye digital "Bogor Lawan Hoaks". Dalam peran sebagai teknisi komunikasi, Humas membuat konten digital, mencatat kegiatan pemerintah, serta melakukan evaluasi terhadap publikasi melalui media monitoring. Secara keseluruhan, Humas Diskominfo berperan penting dalam memperkuat citra positif pemerintah daerah melalui komunikasi publik yang terbuka, akurat, dan melibatkan masyarakat.

Kata Kunci: Citra Pemerintah, Diskominfo, Humas Pemerintah, Komunikasi Publik, Pengelolaan Informasi

Abstract

This study aims to examine the role of the Public Relations Office of the Bogor Regency Communication and Information Agency (Diskominfo) in managing public information. As part of the government, the Public Relations Office has an important task as a liaison between the government and the community, so that the information conveyed is accurate, transparent, and trustworthy. This study uses a descriptive qualitative method by collecting data through direct observation during Field Work Lectures (KKL) and interviews with Diskominfo Public Relations staff, analyzing the data, and drawing conclusions. The results of the study show that all four roles have been well implemented by the Public Relations Office of Diskominfo.

In its role as an expert advisor, the Public Relations Office provides strategic advice in the formulation of public policy messages. In its role as a communication facilitator, the Public Relations Office manages social media and the official website as the main tools for interacting with the community. In its role as a problem-solving facilitator, the Public Relations Office actively responds to hoaxes, such as in the “Bogor Lawan Hoaks” (Bogor Against Hoaxes) digital campaign. In its role as a communication technician, the Public Relations Office creates digital content, records government activities, and evaluates publications through media monitoring. Overall, the Diskominfo Public Relations Office plays an important role in strengthening the positive image of the local government through open, accurate, and community-involving public communication.

Keywords: Communications and Informatics Office, Government Image, Government Public Relations, Information Management, Public Communication

Copyright © 2025 Author. All rights reserved

Resyiana Saffira Rustandi, Laila Fitria Rahma, Nazalla Vidya Marlayza, Intan Amelia, Zikra Mifta hul Jannah, Dwi Sulistiani, Ali Alamsyah Kusumadinata. (2025). Peran Humas Diskominfo dalam Pengelolaan Informasi Pemerintah Daerah. Jurnal JP2N Volume 3 (1); pp 20 - 30.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara pemerintah berkomunikasi dengan masyarakat. Komunikasi publik memiliki peranan penting di zaman digital untuk menciptakan pemerintah yang transparan, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Ndraha et al., 2024). Supaya informasi yang disampaikan tetap tepat, mudah dimengerti, dan bisa meningkatkan kepercayaan publik, pemerintah harus mampu mengatur aliran informasi yang cepat dan meluas. Humas, atau hubungan masyarakat, memainkan peran yang sangat penting dalam menjalin komunikasi yang kredibel dan efektif antara pemerintah dan publik. (Lubis, 2012)

Humas pemerintah tidak hanya berbagi informasi, tetapi juga dapat membentuk opini publik dan melindungi citra lembaga. Sumber daya manusia pemerintah, menurut (Ainunsari, 2025; Faricha et al., 2025), memiliki peranan penting dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas publik dengan cara penyampaian informasi yang jelas dan tepat. Namun, humas menghadapi tantangan yang semakin rumit di era digital, terutama karena informasi menyebarkan dengan cepat dan tidak terkontrol di media sosial. Selain itu, (Iriantara, 2019) menekankan bahwa humas pemerintah harus beradaptasi dengan cara komunikasi digital agar dapat menjaga kepercayaan masyarakat di tengah tingginya tingkat disinformasi.

Dalam konteks ini, kemampuan humas pemerintahan dalam memanfaatkan teknologi digital menjadi sangat penting. Menurut (Mustaqim & Bayu, 2025) Media sosial, situs web resmi, dan aplikasi layanan publik saat ini berperan sebagai saluran utama untuk menyampaikan informasi dan menjalin interaksi dengan masyarakat. Keberhasilan humas tidak hanya dinilai dari seberapa cepat informasi disebarluaskan, tetapi juga dari seberapa efektif pesan tersebut diterima, dipahami, dan mampu memengaruhi persepsi masyarakat secara positif (Septia et al., 2024; Afida, 2025). Hal ini sejalan dengan pendapat (Budhirianto, 2022) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi digital memungkinkan humas membangun komunikasi dua arah yang lebih efektif antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, humas harus memiliki keterampilan digital yang kuat dan strategi komunikasi yang dapat disesuaikan dengan karakteristik pengguna media modern.

Selain itu, sinergi antara humas dan berbagai lembaga daerah juga merupakan faktor penting dalam menciptakan komunikasi publik yang terpadu. Kerja sama antar sektor memungkinkan penyebaran pesan yang konsisten dan menghindari tumpang tindih informasi, sekaligus memastikan setiap pihak menyampaikan pesan yang sejalan dengan tujuan Bersama (Widjaja & Dhanudibroto, 2025; Hakanna et al., 2018). Dalam hal ini, koordinasi antarinstansi menjadi kunci agar informasi yang diterima masyarakat tidak menimbulkan kebingungan. Dengan pendekatan kolaboratif tersebut, humas dapat berperan sebagai pusat kendali informasi yang memastikan pesan pemerintah tersampaikan secara cepat, akurat, dan berimbang. Dalam hal ini, kerjasama antarinstansi menjadi penting agar informasi yang diterima publik tidak menyebabkan kebingungan. Dengan pendekatan kolaboratif itu, humas dapat berfungsi sebagai pusat pengendalian informasi yang menjamin pesan pemerintah disampaikan secara cepat, tepat, dan seimbang (Setiawati, 2018).

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor bertanggung jawab atas pengelolaan informasi publik dan pendistribusian pesan pemerintah daerah. Dengan cara yang sistematis dan transparan, sektor hubungan masyarakat Diskominfo memastikan bahwa setiap kegiatan, program, dan kebijakan pemerintah daerah disampaikan kepada masyarakat. Kampanye digital “Bogor Lawan Hoaks” yang dilaksanakan selama pandemi COVID-19 menampilkan peran penting humas Diskominfo.

Kampanye ini bertujuan untuk menanggulangi penyebab hoaks dan meningkatkan pemahaman digital masyarakat mengenai pentingnya suber informasi yang benar.

Temuan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa fungsi humas pemerintah dalam komunikasi publik memiliki dampak signifikan terhadap transparansi dan kepercayaan masyarakat. Untuk memastikan pesan pemerintah sampai kepada masyarakat di era digital, diperlukan strategi komunikasi yang kreatif dan responsif, menurut (Putra, 2017). Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh (Sukrillah et al., 2017; Nugraha et al., 2022; Tsaqif et al., 2025) menunjukkan bahwa pemanfaatan media sosial oleh pemerintah daerah sangat berperan penting dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat serta memperkuat reputasi lembaga. Studi ini mengeksplorasi beragam metode Humas Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskomsinfo) Kabupaten Bogor dalam melaksanakan tugasnya mengelola informasi publik serta menerapkan strategi komunikasi digital guna meningkatkan transparansi dan memperkuat kepercayaan masyarakat pada pemerintah daerah. Penelitian ini memiliki tujuan mengetahui serta menganalisis peran Humas Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor dalam mengelola informasi di era digital

METODE PELAKSANAAN

Peran Humas Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor dalam pengelolaan informasi publik diteliti dalam penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif (Madaniy & Febri, 2025). Metode ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman kontekstual mengenai cara humas pemerintah berinteraksi dengan tantangan arus informasi digital. Penelitian ini menyoroti kegiatan humas di Diskominfo Kabupaten Bogor, khususnya yang berkaitan dengan publikasi kebijakan pemerintah daerah, cara komunikasi publik, penanganan isu melalui media digital.

Informasi ini didapatkan melalui observasi serta dokumentasi yang mencakup arsip kegiatan, postingan di media sosial, serta laporan publikasi resmi. Analisis data dilakukan oleh (Suyitno, 2018) menggunakan model Miles dan Huberman, yang mencakup pengurangan data, presentasi data, dan penarikan kesimpulan. Untuk memastikan valid data, diterapkan Teknik triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan hasil dari observasi, dan dokumentasi. Dengan pendekatan ini, penelitian ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai fungsi Humas Diskominfo Kabupaten Bogor dalam pengelolaan informasi publik dan pembentukan kepercayaan masyarakat di zaman digital.

HASIL PEMBAHASAN

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor ditentukan melalui Peraturan Bupati Bogor Nomor 122 Tahun 2021 mengenai Posisi, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Prosedur Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor bertanggung jawab membantu Bupati dalam mengelola urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian, dan Statistik serta tugas pendukung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat peran humas dijalankan secara sinergis untuk mendukung pengelolaan informasi publik. Prinsip kerja Humas diterapkan oleh Humas Diskominfo dengan empat strategi tersebut. Strategi peliputan dan

pemantauan media tergolong dalam tahap pengumpulan informasi, yang meliputi pengumpulan data serta informasi tentang isu yang muncul di masyarakat. Perencanaan dan pelaksanaan komunikasi mencakup kegiatan perarsipan, dokumentasi, serta penerbitan informasi. Tahap ini memungkinkan informasi pemerintah disampaikan dengan baik kepada masyarakat. Evaluasi ini dilaksanakan dengan cara memantau media guna mengetahui tanggapan masyarakat terhadap pesan itu. Metode ini menjamin bahwa cara komunikasi yang diterapkan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mendukung pemelihat.

Berdasarkan hasil dari observasi dan wawancara yang dilakukan dengan pegawai Humas Diskominfo Kabupaten Bogor, tampak bahwa keempat peran yang tercantum dalam Tabel 1 dimainkan secara konsisten dalam upaya pengelolaan informasi publik. Hasil data menunjukkan bahwa meskipun setiap peran memiliki aplikasi yang berbeda, mereka saling mendukung untuk menciptakan persepsi yang baik tentang pemerintah daerah.

Penasehat Ahli (Expert Prescriber)

Humas Diskominfo bertugas sebagai Penasehat Ahli dan memberikan saran strategis kepada pimpinan daerah. Saran ini terutama berkaitan dengan pembuatan publikasi kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara, humas juga berperan dalam menentukan narasi utama dan waktu publikasi yang dianggap paling efektif untuk memastikan bahwa pesan pemerintah dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. *"Menurut staf Humas Diskominfo, kami rutin memberikan masukan kepada pimpinan daerah mengenai isu yang berkembang di publik sebelum diputuskan strategi komunikasi"*. Dalam menjalankan tugasnya, humas diskominfo tidak hanya mengandalkan perasaan, tetapi juga menggunakan data dan informasi yang benar. Data dari pemantauan media harian, analisis perasaan publik, serta hasil penelitian internal digunakan sebagai dasar dalam menyusun rekomendasi komunikasi.

Fasilitator Komunikasi (Communication Facilitator)

Humas membantu pemerintah berkomunikasi dengan masyarakat melalui kanal media sosial dan website resmi Diskominfo sebagai fasilitator komunikasi (Maura & Parsono, 2024). Menurut data wawancara, karyawan humas secara aktif mengamati tanggapan masyarakat, menjawab pertanyaan publik, dan menyebarkan informasi tersebut ke bidang yang relevan. Salah satu staff Diskominfo menyatakan *"Kami selalu berkoordinasi dengan tim liputan untuk memastikan setiap kegiatan pimpinan terdokumentasi dengan baik dan bisa segera dipublikasikan ke masyarakat"*. Setelah masalah itu selesai ditangani, humas Diskominfo akan membagikan hasil tindak lanjut kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi pemerintah. Kegiatan ini menunjukkan bahwa komunikasi yang dibangun adalah dua arah, bukan hanya satu arah.

Table 1. Peran Humas Diskominfo

No	Peran Humas (Dozier & Broom, 1995)	Bentuk Implementasi di Diskominfo Kabupaten Bogor	Strategi Komunikasi yang Diterapkan	Temuan Penelitian / Dampak
1	Penasehat Ahli (Expert Prescriber)	Memberikan saran strategis kepada pimpinan daerah dalam penyusunan narasi dan pesan kebijakan publik.	Liputan & Publikasi: Meliput seluruh agenda pemerintah daerah dan membuat konten edukatif tentang kebijakan.	Informasi kebijakan tersampaikan secara luas dan cepat; meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap program pemerintah.
2	Fasilitator Komunikasi (Communication Facilitator)	Menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat melalui kanal digital (website, media sosial).	Pemanfaatan Media Sosial: Mengelola Instagram, Twitter/X, dan website resmi dengan konten kreatif seperti infografis dan video.	Komunikasi dua arah terbangun antara pemerintah dan masyarakat; meningkatkan interaksi dan kepercayaan publik.
3	Fasilitator Pemecahan Masalah (Problem Solving Facilitator)	Terlibat dalam penanganan isu publik dan hoaks, misalnya kampanye <i>"Bogor Lawan Hoaks"</i> .	Media Monitoring: Memantau isu dan opini publik setiap hari untuk mendeteksi hoaks dan isu negatif.	Pemerintah mampu merespons isu publik lebih cepat dan menjaga citra positif di mata masyarakat.
4	Teknisi Komunikasi (Communication Technician)	Membuat berita, konten visual, serta melakukan dokumentasi dan media monitoring terhadap kegiatan pemerintah.	Dokumentasi & Pengarsipan: Menyimpan data dan arsip kegiatan sebagai bahan publikasi dan bukti akuntabilitas.	Informasi pemerintah terdokumentasi dengan baik, menjadi sumber data resmi, dan memperkuat transparansi publik.

Fasilitator Pemecahan Masalah (Problem Solving Facilitator)

Humas dapat membantu memecahkan masalah saat menghadapi hoaks dan masalah publik. Observasi menunjukkan bahwa humas bekerja sama dengan bidang komunikasi publik untuk memberikan penjelasan tentang masalah tersebut, dan kemudian menyebarkan infografis dan berita klarifikasi melalui media sosial resmi. Dalam wawancara, salah satu pegawai humas Diskominfo menjelaskan: *"Kalau ada isu yang berkembang atau kesalahpahaman di masyarakat, kami biasanya rapat dulu dengan bidang terkait untuk mencari solusi dan cara penyampaiannya yang tepat"*. Kampanye *"Bogor Lawan Hoaks"* adalah contoh yang paling terkenal, di mana humas berpartisipasi secara aktif dalam pembuatan pesan pendidikan dan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk memastikan informasi yang akurat.

Teknisi Komunikasi (Communication Technician)

Peran teknis yang dijalankan Humas Diskominfo Kabupaten Bogor berkontribusi signifikan terhadap efektivitas penyebaran informasi pemerintah kepada masyarakat melalui penyajian yang lebih menarik dan mudah dipahami. Sejalan dengan temuan (Putra, 2017), humas pemerintah dituntut memiliki literasi media yang baik guna memaksimalkan pemanfaatan teknologi komunikasi digital. Salah satu staf PIKP Diskominfo menyatakan bahwa setiap kegiatan pimpinan daerah didokumentasikan, kemudian diolah menjadi berita atau konten untuk dipublikasikan melalui media sosial dan situs resmi, dengan tugas pengeditan video dan penulisan berita menjadi bagian dari rutinitas kerja. Melalui peran ini, Humas Diskominfo memastikan informasi mengenai kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah dapat disampaikan secara menarik, mudah dicerna, serta tepat sasaran. Selain itu, peran teknisi komunikasi menuntut kreativitas dalam penyusunan pesan agar sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan audiens. Temuan lapangan juga menunjukkan bahwa Humas Diskominfo tidak hanya berfokus pada diseminasi informasi, tetapi turut membangun hubungan publik yang partisipatif. Dengan perpaduan antara fungsi strategis dan teknis, Humas Diskominfo berperan sebagai pusat komunikasi publik yang efektif dalam pemerintahan Kabupaten Bogor.

Analisis peranan Humas Diskominfo Kabupaten Bogor menunjukan bahwa strategi komunikasi yang di terapkan tidak berpengaruh pada keberhasilan pengelolaan informasi publik. Untuk mencapai sasaran komunikasi pemerintah, strategi ini diterapkan untuk merancang, menyampaikan, dan menilai pesan kepada masyarakat. Temuan dari wawancara dan observasi mengidentifikasi bahwa Humas Diskominfo menerapkan strategi komunikasi publik yang mengedepankan transparansi informasi, penggunaan media digital, dan keterlibatan masyarakat. Menurut (Phonna & Primasari, 2022) Strategi komunikasi ini tidak hanya fokus pada distribusi pesan, ia juga berupaya membangun hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Setiap tahap komunikasi dari merancang pesan, memilih media, hingga mengevaluasi efektivitas publisitas di laksanakan secara terencana.

Prinsip kerja Humas diterapkan oleh Humas Diskominfo dengan empat strategi tersebut. Strategi peliputan dan pemantauan media tergolong dalam tahap pengumpulan informasi, yang meliputi pengumpulan data serta informasi tentang isu yang muncul di masyarakat. Perencanaan dan pelaksanaan komunikasi mencakup kegiatan perarsipan, dokumentasi, serta penerbitan informasi. Tahap ini memungkinkan informasi pemerintah disampaikan dengan baik kepada masyarakat. Evaluasi ini dilaksanakan dengan cara memantau media guna mengetahui tanggapan masyarakat terhadap pesan itu. Metode ini menjamin bahwa cara komunikasi yang diteraplam tidak haya bersifat teknis, tetapi juga mendukung pemelihat.

Memanfaatkan media digital seperti website dan akun media sosial resmi @kabupaten bogor, merupakan strategi utama untuk menyebarkanluaskan informasi mengenai aktivitas pemerintah daerah. Masyarakat bisa menjangkau khalayak yqang lebih besar juga efisien melalui saluran digital ini. Pengelolaan masalah dan penjelasan

memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berbicara guna meningkatkan kepercayaan publik serta memperbaiki transparansi informasi. Humas Diskominfo Kabupaten Bogor bisa mengimplementasikan strategi –strategi ini untuk menciptakan komunikasi publik yang lebih terbuka, partisipatif, dan sesuai dengan kebutuhan warga.

Peran Humas Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor dalam mengelola informasi publik dan memperkuat citra positif pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 122 Tahun 2021, Diskominfo memiliki tugas membantu Bupati dalam urusan komunikasi, informatika, persandian, dan statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat peran humas yakni expert prescriber, communication facilitator, problem solving facilitator, dan communication technician dijalankan secara sinergis melalui strategi komunikasi yang menekankan transparansi, partisipasi, dan pemanfaatan media digital. Humas berperan sebagai penasihat ahli dalam penyusunan pesan kebijakan, fasilitator komunikasi melalui website dan media sosial, pemecah masalah dengan menangani isu publik serta hoaks melalui kampanye digital “Bogor Lawan Hoaks,” dan teknisi komunikasi yang memproduksi konten kreatif serta melakukan dokumentasi dan evaluasi publikasi. Dengan penerapan strategi peliputan, publikasi, pemantauan media, serta komunikasi dua arah yang responsif, Humas Diskominfo berhasil membangun hubungan yang lebih terbuka antara pemerintah dan masyarakat serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.

KESIMPULAN

Humas Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor memiliki peran strategis dalam mengelola informasi publik dan membangun citra positif pemerintah daerah. Humas dapat menjembatani hubungan antara pemerintah dan masyarakat dengan lebih cepat, transparan, dan partisipatif dengan menggunakan pendekatan komunikasi publik digital. Keempat peran humas teknisi komunikasi, fasilitator pemecahan masalah, fasilitator komunikasi, dan penasihat ahli telah dimainkan secara seimbang di Departemen Informasi Kabupaten Bogor. Strategi komunikasi yang direncanakan, seperti manajemen isu publik, kolaborasi lintas instansi, dan penggunaan media digital, mendukung penerapan peran tersebut. Selain itu, Humas Diskominfo berhasil mengoptimalkan komunikasi dua arah melalui media sosial sehingga masyarakat tidak hanya menerima informasi tetapi juga dapat memberikan umpan balik langsung terhadap program pemerintah. Humas mampu meningkatkan kepercayaan publik dan meningkatkan efektivitas penyampaian pesan pemerintah daerah. Humas membantu mewujudkan tata kelola informasi publik yang jelas, kreatif, dan beradaptasi dengan kemajuan teknologi komunikasi.

PUSTAKA

- Afida, W. R. (2025). *Strategi Komunikasi Humas Pemerintah Kabupaten Purbalingga Dalam Meningkatkan Citra Positif di Masyarakat*. Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Ainunsari. (2025). Tantangan dan Solusi dalam Manajemen Humas Pemerintah untuk Meningkatkan Transparansi. *Tempora: Journal of Management*, 1(1), 1–6.
- Budhirianto, S. (2022). *Transformasi Pendekatan Komunikasi Publik Pada Humas Pemerintah di Era Digital* (Issue 2). Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika.
- Fahri, M. E., & Unde, A. A. (2018). Analysis of Government Public Relations Role and Function in Global Information Era at Legislative House Central Sulawesi Province. <https://journal.unhas.ac.id/>, 7(2), 9.
- Faricha, RD; El Adawiyah, S & Kusumadinata, AA (2025). Pengaruh Hubungan Manusia Terhadap Kinerja Karyawan Politeknik Sahid Jakarta. *HUMANUS : Jurnal Sosiohumaniora Nusantara*, 2 (2), 376-382. <https://doi.org/10.62180/cf6h4a63>
- Giffari, M. F., Andriani, F., Wiyati, E. K., & Putri, C. E. (2024). *Peran Humas Dalam Keterbukaan Informasi Publik Pada PPID Kemendikbudristek*. 4(2), 119–131.
- Hakanna, H., Ratnamulyani, IA, & Kusumadinata, AA (2018). Strategi Public Relations Dalam Menjaga Corporate Image Di PT PERTAMINA (PERSERO) MARKETING OPERATION WILAYAH (MOR) III. *JURNAL KOMUNIKATIO*, 4 (2). <https://doi.org/10.30997/jk.v4i2.1213>.
- Iriantara, Y. (2019). Government PR 4.0. In *Jurnal Media Nusantara* (Vol. 16, Issue 1). Universitas Islam Nusantara. <https://doi.org/10.30999/medinus.v16i1.630>
- Lubis, E. E. (2012). *Peran Humas Dalam Membentuk Citra Pemerintah* (Vol. 12). Fisip Universitas Riau.
- Madaniy, K. I., & Febri, A. V. (2025). *Strategi Humas Diskominfo Kabupaten Bogor Dalam Pengelolaan Akun Instagram @ Kabupaten . Bogor Sebagai Sarana Diseminasi Informasi Publik*. 4(5), 267–276.
- Maura, L. S., & Parsono, S. (2024). *Strategi Pengelolaan Informasi Instagram @ Kabupaten . Bogor Dalam Meraih Predikat 1 Media Sosial Terbaik Humas Jabar Awards 2023*. *Instagram Information Management Strategy*. 2010, 56–65.
- Mustaqim, & Bayu, C. M. A. (2025). *fektivitas Pengelolaan Portal www.beritadepok.go.id Sebagai Media Penyampaian Informasi Pemerintahan Di Kota Depok*. V(2).
- Ndraha, A. B., Waruwu, E., Zebua, D., Zega, A., Ekonomi, F., Nias, U., Ekonomi, F., Nias, U., Sipil, T., Nias, U., Akuatik, S. D., & Nias, U. (2024). *Kebijakan kelembagaan kehumasan dan jurnalistik untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan*. 01(September), 23–31.
- Nugraha, A. R., Sjoraida, D. F., & Novianti, E. (2022). Analisis strategi humas pemerintahan era milenial dalam menghadapi tata kelola informasi publik. *PROfesi Humas Jurnal*

- Ilmiah Ilmu Hubungan Masyarakat*, 6(2), 286.
<https://doi.org/10.24198/prh.v6i2.37095>
- Phonna, I. D., & Primasari, I. (2022). *Strategi Komunikasi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bogor Dalam Membentuk Citra Positif Pemerintahan Kabupaten Bogor Communication Strategy Of The Communication And Informatics Office Of Bogor Regency In Shapping A Positive Image Of The Bogor Regency Government*. 9(4), 2657–2662.
- Putra, N. A. (2017). Literasi Media Sosial Humas Pemerintah Daerah. In *Informasi* (Vol. 47, Issue 2). Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitain Komunikasi dan Informatika (BPSDMP Kominfo. <https://doi.org/10.21831/informasi.v47i2.17235>.
- Septia, Anggie;Agustina, Eneng ; Dila, Ina; Ilmi, Lu'lu ; Najwa, Maura; Aura, Rieke; Amanda, Silvia; Alifiani, Yesha ; Karina, Zahra. (2024) Strategi Humas Sekretariat DPRD Kota Bogor dalam Membuat Konten Instagram untuk Penyebaran Informasi Publik. *HUMANUS : Jurnal Sosiohumaniora Nusantara*, 2(1), 39-52. <https://doi.org/10.62180/75h3zv44>
- Setiawati, N. A. (2018). *Koordinasi Antar Instansi dalam Inovasi Layanan Pengaduan Darurat Command Center 112 di Kota Surabaya*. 6(April), 1–11.
- Sukrillah, A., Ratnamulyani, IA, & Kusumadinata, AA (2017). Pemanfaatan media sosial melalui whatsapp group FEI sebagai sarana komunikasi. *Jurnal komunikasi* , 3 (2). 95-104. <https://doi.org/10.30997/jk.v3i2.919>
- Suyitno. (2018). *Penelitian kualitatif* (D. H. A. Tanzeh (ed.)). https://kangkholidblog.wordpress.com/wp-content/uploads/2021/10/buku_metode_penelitian.pdf.pdf.
- Tsaqif, G. Q., Hidayah, H. U. T., Al Firza, C. A. F., Ananda, P., & Zebua, W. D. A. (2025). Optimalisasi Peran Humas Pemerintah Dalam Meningkatkan Branding Pariwisata Bandung. *HUMANUS: Jurnal Sosiohumaniora Nusantara*, 2(2), 217-226.DOI: <https://doi.org/10.62180/7zvw0b60>.
- Widjaja, G., & Dhanudibroto, H. (2025). *Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Efektivitas Kebijakan Kesejahteraan* (Vol. 4, Issue 7). Sibatik Journal.